

Pengembangan Alur Layanan Penanggulangan Bencana Banjir terhadap Penyandang Disabilitas di BPBD Barito Kuala

Author:

Dina Roswandi Siregar¹
Mirnawati²
Sakerani³
Amka⁴

Afiliation:

Universitas Lambung
Mangkurat^{1,2,3,4}

Corresponding email

dina.roswandi.s@gmail.com¹
mirnawati.plb@ulm.ac.id²
sakerani@ulm.ac.id³
amka.plb@ulm.ac.id⁴

Histori Naskah:

Submit: 2026-02-02
Accepted: 2026-04-02
Published: 2026-04-05



*This is an Creative Commons License This
ork is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Barito Kuala yang setiap tahun mengalami banjir besar dan menimbulkan dampak serius bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra yang memiliki keterbatasan mobilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Barito Kuala, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat alur layanan penanganan bencana yang bersifat inklusif dan ramah disabilitas. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya kolaborasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, serta belum adanya alur layanan bagi penyandang disabilitas ketika terjadi bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Research and Development* (R&D) model 3D (Define, Design, Develop) yang diadaptasi dari 4D oleh Thiagarajan, dkk. Sumber data terdiri atas BPBD Barito Kuala, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dosen ahli pendidikan khusus, serta penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, *Forum Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Barito Kuala belum memiliki sistem layanan kebencanaan yang inklusif sehingga warga disabilitas belum terakomodasi saat terjadi banjir. Alur layanan yang dikembangkan dalam penelitian ini memuat tiga fase utama, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan disabilitas yang dinyatakan layak oleh tiga orang validator, serta dinilai mudah dipahami, dapat diakses, dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas menurut pengguna. Produk akhir penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman operasional BPBD Barito Kuala dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang adaptif, berkeadilan, dan ramah disabilitas.

Kata kunci: Alur Layanan; Banjir; BPBD; Disabilitas; Penanggulangan Bencana.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau besar maupun kecil dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga wilayah pesisir. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6° LU–11° LS dan 95° BT–141° BT, sehingga beriklim tropis. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 3.472 kejadian

bencana di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, dan banjir menempati posisi teratas dibandingkan jenis bencana lain (Bencana, 2024). Kondisi ini juga terlihat jelas di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Barito Kuala yang hampir setiap tahun dilanda banjir dengan dampak cukup besar bagi masyarakat. BPBD Barito Kuala mencatat lebih dari 80.000 jiwa korban terdampak selama periode 2021 sampai 2025, puncaknya berada saat bencana banjir besar sehingga menimbulkan korban jiwa 18 orang dalam sekali kejadian. Kerangka hukum untuk penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007), sedangkan perlindungan penyandang disabilitas ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Kedua undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, berhak atas perlindungan dan keselamatan dalam situasi darurat. Namun, penerapannya di lapangan masih belum optimal, khususnya dalam konteks kebencanaan inklusif (Pramono, 2023).

Urgensi penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung pada 7 September 2025 dengan Kepala BPBD Barito Kuala, Bapak Mirwan Efendi Siregar S.T., S.H., M.H., menunjukkan bahwa isu prioritas di BPBD Barito Kuala terkait dengan disabilitas adalah penghapusan stigma. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Dante Rigmalia, M.Pd., dalam Webinar Nasional BNPD pada 12 Agustus 2025. Dante menegaskan bahwa perlakuan terhadap disabilitas harus dibedakan dari non-disabilitas. BPBD Barito Kuala sebenarnya sudah memiliki rencana awal untuk menyusun alur layanan bagi penyandang disabilitas. Namun, rencana tersebut hingga kini belum direalisasikan. Akibatnya, tidak ada alur layanan khusus yang bisa menjadi pedoman bagi BPBD ketika harus melayani penyandang disabilitas dalam situasi pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Kendala utama yang membuat upaya BPBD Barito Kuala belum berhasil adalah minimnya kerja sama lintas pihak.

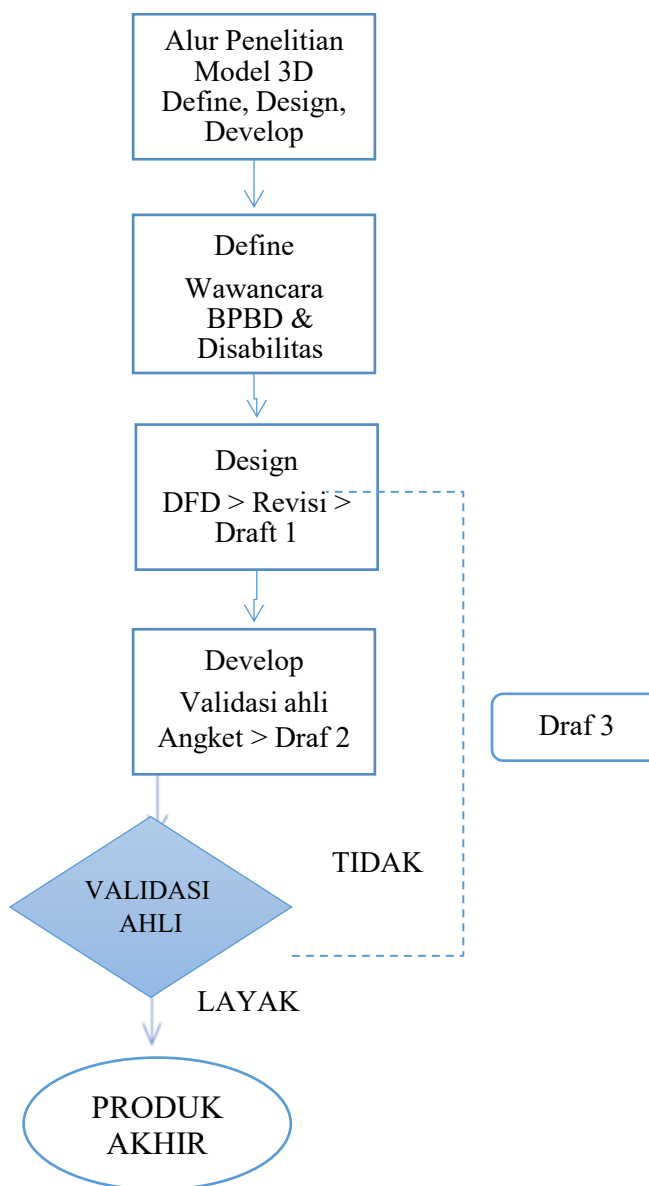
Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi melalui pengembangan alur layanan penanganan bencana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penanganan bencana banjir masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Selama ini, layanan kebencanaan cenderung bersifat umum dan belum dilengkapi dengan alur layanan yang secara khusus mengakomodasi keterbatasan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan evakuasi, keterbatasan akses informasi, serta ketidaksesuaian bantuan yang diterima. Kendala utama yang membuat upaya BPBD Barito Kuala belum berhasil adalah minimnya kerja sama lintas pihak. Pihak tersebut adalah instansi yang berkaitan dengan disabilitas, salah satunya kerja sama dengan ahli di kampus jurusan pendidikan khusus. Ahli lainnya juga disebutkan yang berasal dari dinas sosial, dinas kesehatan, dan juga dinas pendidikan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa BPBD sangat terbuka apabila ada pihak lain yang ingin berkolaborasi, karena kolaborasi dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan sistem kebencanaan yang inklusif. Namun, tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lain, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat, upaya ini sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif dan aplikatif sebagai pedoman operasional bagi BPBD dalam melayani penyandang disabilitas.

Studi Literatur

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan peran penting dalam penanggulangan bencana banjir. Picasauw (2020) menemukan bahwa BPBD Kota Balikpapan telah melaksanakan upaya mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi, namun masih menghadapi kendala

berupa kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata dan pelayanan rehabilitasi yang belum optimal. Selanjutnya, Raya (2020) mengungkapkan bahwa strategi BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam pengurangan risiko banjir mencakup aspek organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan, dengan dukungan SDM dan partisipasi masyarakat, meskipun terbatas oleh anggaran. Penelitian lain oleh Bria dkk. (2025) menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Malaka pada fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana telah berjalan cukup baik, tetapi masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, aksesibilitas wilayah, serta distribusi informasi kebencanaan yang belum merata. Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama menyoroti peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir, belum ada yang secara spesifik membahas pengembangan alur layanan penanganan bencana yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui perancangan alur layanan penanggulangan bencana banjir yang lebih inklusif dan aplikatif bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penanggulangan bencana banjir oleh BPBD masih lebih banyak berfokus pada aspek kelembagaan, strategi umum, dan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, kajian yang secara spesifik membahas pengembangan alur layanan penanggulangan bencana yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan alur layanan penanggulangan bencana banjir yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas secara lebih terstruktur dan aplikatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang pendidikan khusus dan manajemen kebencanaan, khususnya terkait konsep dan model alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai kebencanaan inklusif, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan layanan penanggulangan bencana berbasis kebutuhan penyandang disabilitas, terutama pada konteks daerah rawan banjir.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan mixed method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian agar hasilnya lebih lengkap dan mendalam. Yang disebut mixed-method dengan metode Research and Development (R&D) dengan model 3D (Define, Design, Develop) yang diadaptasi dari model 4D (Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974, dalam (Slamet, 2022)) yang bertujuan untuk mengembangkan alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas. Tahap-tahap Model 3D terdiri dari *Define*, *Design*, dan *Develop*. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas Kepala BPBD Barito Kuala, Sekretaris BPBD, Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta staf BPBD, dosen dan alumni Pendidikan Khusus, perwakilan Dinas Kesehatan; perwakilan Dinas Sosial, perwakilan Dinas Pendidikan serta penyandang disabilitas. Selain itu, juga dihadiri peserta FGD sebanyak 50 partisipan. Perwakilan masing-masing dari instansi Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari

jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Forum Group Discussion (FGD), dokumentasi, dan angket. Kemudian Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung dengan teknik triangulasi data. Sementara itu, analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data hasil pengisian angket untuk menilai kelayakan produk.

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Validator terhadap Alur Layanan

No.	Rata-Rata Nilai dari Validator (V_a)	Keterangan
1	$1,00 < V_a \leq 1,50$	Tidak Layak
2	$1,50 < V_a \leq 2,50$	Kurang Layak
3	$2,50 < V_a \leq 3,50$	Cukup Layak
4	$3,50 < V_a \leq 4,50$	Layak
5	$4,50 < V_a \leq 5,00$	Sangat Layak

Keterangan:

V_a = Tingkat kevalidan alur layanan

Hasil

1. Define

Pada tahap pertama adalah *define* yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan BPBD dan disabilitas untuk memperoleh informasi atau pandangan terkait pembuatan draf sementara alur layanan. Berikut ini merupakan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan BPBD dan penyandang disabilitas.

a. Fokus Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Isu disabilitas di BPBD Kabupaten Barito Kuala telah mulai menjadi perhatian, khususnya berdasarkan data terdapat 1522 orang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala. Namun, fokus penanganan yang diterapkan masih bersifat umum, yaitu menjamin keselamatan seluruh masyarakat terdampak bencana. Hingga saat ini, belum terdapat kebijakan teknis, SOP, maupun alur layanan khusus yang secara spesifik mengatur penanganan bencana bagi penyandang disabilitas.

b. Akses Informasi Kebencanaan

Penyampaian informasi kebencanaan termasuk secara umum belum disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kondisi ini berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dalam memahami informasi secara cepat dan jelas. Dari sisi penyandang disabilitas, terdapat harapan agar informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan inklusif.

c. Proses Evakuasi dan Mobilitas

Penyandang disabilitas menghadapi risiko tinggi dalam proses evakuasi akibat keterbatasan mobilitas, ketergantungan pada alat bantu, serta kondisi lingkungan yang tidak selalu mendukung. BPBD mengidentifikasi keterbatasan sarana evakuasi yang aksesibel, sementara penyandang disabilitas menekankan pentingnya pendampingan petugas dan transportasi evakuasi yang aman serta sesuai dengan kondisi fisik mereka.

d. Ketersediaan Bantuan dan Fasilitas Pendukung

Fasilitas pengungsian dan bantuan kebencanaan yang tersedia belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengharapkan bantuan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan khusus, seperti alat bantu mobilitas, jalur evakuasi yang aman, serta fasilitas yang mendukung keselamatan dan kenyamanan selama masa darurat.

e. Koordinasi Lintas Sektor dan Pengembangan Alur Layanan

BPBD mengakui bahwa penyusunan alur layanan atau SOP kebencanaan inklusif belum terealisasi akibat keterbatasan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, terdapat rencana untuk mengembangkan alur layanan melalui forum diskusi, evaluasi lapangan, dan penyusunan SOP yang lebih komprehensif. Penyandang disabilitas juga menegaskan perlunya alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Design

Tahap kedua adalah *design* artinya mendesain. Bagian ini merupakan rancangan awal naskah penelitian yang disusun sebelum pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), sebagai dasar pemaparan awal gagasan penelitian, sekaligus untuk memperoleh masukan penyesuaian agar sesuai dengan tujuan dan arah penelitian yang ditetapkan. Berikutnya adalah poin-poin penting yang diperoleh dari hasil Focus Group Discussion (FGD), yang mencerminkan pandangan para peserta melalui pemberian opini melalui diskusi yang dilakukan bersama-sama. Seluruh masukan tersebut disampaikan berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan di daerah Barito Kuala untuk membuat draf 1, sehingga menggambarkan perspektif peserta yang kontekstual dan relevan dengan karakteristik wilayah setempat. Adapun pesertanya yaitu Kepala BPBD Barito Kuala, Sekretaris BPBD, Kasi Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Staf, Dosen dan Alumni Pendidikan Khusus, Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas Sosial, dan Disabilitas.

Tahap	Deskripsi	Keterangan
Pra-Bencana	Pembagian peran masing-masing instansi sesuai dengan bidang tersendiri.	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
Saat Bencana	Penggunaan berbagai informasi kebencanaan seperti aplikasi, sirine, SMS, <i>voice message</i> sesuai dengan kondisi disabilitas	Dinas Pendidikan
Pasca-Bencana	Melibatkan aparat kepolisian untuk pengamanan rumah korban saat evakuasi pengungsian	BPBD
	Pendampingan saat bencana yang lebih operasional menyesuaikan disabilitas	Dinas Kesehatan
	Relawan dengan kompetensi khusus disabilitas	Dinas Sosial

3. *Develop*

Tahap terakhir adalah *Develop* yang artinya pengembangan. Dalam tahap ini munculah draf 2 yang disusun berdasarkan hasil diskusi, pendapat, serta berbagai masukan dari seluruh peserta, dan telah divalidasi oleh para ahli. Berjumlah 3 validator dari berbagai macam bidang yaitu dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Isi alur layanan ini dinilai lebih komprehensif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan di Barito Kuala.

Tahap	Kegiatan	Uraian
Pra-Bencana	1. Pendataan dan Pemetaan Disabilitas	BPBD bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan melakukan pendataan serta pemetaan lokasi penyandang disabilitas. Data diperbarui secara berkala.
	2. Sosialisasi dan Edukasi Inklusif	Materi kesiapsiagaan disusun dalam format aksesibel seperti braille, video dengan subtitle, dan bahasa isyarat, serta melibatkan relawan disabilitas sebagai duta kesiapsiagaan.
	3. Simulasi dan Pelatihan Tanggap Bencana	Pelatihan evakuasi dan penggunaan alat bantu mobilitas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai cara membantu penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
	4. Penyediaan Infrastruktur Aksesibel	Penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul yang dilengkapi ramp, rambu taktil, penerangan yang memadai, serta pemeriksaan transportasi evakuasi yang aksesibel (mobil/perahu).
	5. Koordinasi Lintas Instansi	Pembentukan Tim Siaga Disabilitas yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, relawan, serta perwakilan komunitas disabilitas, termasuk penunjukan penanggung jawab wilayah rawan.
Saat Bencana	1. Peringatan Dini Inklusif	Informasi banjir disampaikan melalui aplikasi, sirine, SMS, dan pesan suara, disertai penjelasan langsung kepada penyandang disabilitas sensorik oleh petugas.
	2. Evakuasi Aman dan Terarah	Tim evakuasi yang telah dilatih menangani berbagai jenis disabilitas melakukan evakuasi dengan prioritas pada kelompok rentan menggunakan transportasi khusus, serta bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menjamin keamanan lingkungan.
	3. Pelayanan di Posko Pengungsian	Penyediaan posko pengungsian inklusif yang dilengkapi akses kursi roda, toilet disabilitas, area tenang bagi penyandang autisme, serta ketersediaan alat bantu sementara oleh tenaga medis.
	4. Pendampingan saat Bencana	Pemberian dukungan psikologis dengan metode komunikasi sesuai kebutuhan, seperti bahasa isyarat, tulisan, dan visual, dengan keterlibatan aktif relawan disabilitas.
	5. Koordinasi dan Laporan Cepat	Tim lapangan menyampaikan laporan cepat kepada posko induk mengenai kondisi dan jumlah penyandang disabilitas yang telah tertangani.

Tahap	Kegiatan	Uraian
Pasca-Bencana	1. Pendataan dan Penilaian Kebutuhan	BPBD dan Dinas Sosial melakukan pendataan kebutuhan alat bantu, hunian, serta dukungan lainnya bagi penyandang disabilitas terdampak bencana.
	2. Pemulihan Fisik dan Psikososial	Pelaksanaan layanan kesehatan lanjutan dan konseling pascabencana secara inklusif, dengan pendampingan oleh relawan yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas.
	3. Pemulihan Ekonomi dan Sosial	Pemberian bantuan ekonomi dan program pemberdayaan berbasis komunitas disabilitas melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
	4. Evaluasi dan Dokumentasi	Evaluasi efektivitas alur layanan, pembaruan SOP, serta penyusunan rekomendasi peningkatan aksesibilitas fasilitas umum.
	5. Pelaporan dan Advokasi	Penyusunan laporan hasil penanggulangan bencana yang memuat kondisi penyandang disabilitas serta advokasi kepada pemerintah daerah agar menjadi dasar penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Berikut ini disajikan hasil validasi ahli yang diperoleh melalui angket penilaian kelayakan. Validasi ini dilakukan oleh para ahli dari instansi terkait dengan tujuan untuk menilai tingkat kevalidan, kelayakan, serta kesesuaian alur layanan yang dikembangkan dengan kondisi nyata dan kebutuhan di lapangan. Penilaian mencakup berbagai aspek penting, antara lain kelayakan isi, keterpahaman dan sistematika, tampilan produk, kepraktisan penggunaan, serta kebermanfaatan dan inovasi. Hasil penilaian dari para validator selanjutnya diolah untuk memperoleh nilai rata-rata kevalidan (Va) sebagai dasar dalam menentukan kategori kelayakan alur layanan.

Aspek Penilaian	Aprianty Wulandari (Dinas Sosial)	Abdul Mazid (Dinas Pendidikan)	Rabiatun Nazifah (Dinas Kesehatan)
Kelayakan Isi	5,00	4,67	4,00
Keterpahaman dan Sistematika	5,00	5,00	4,00
Kelayakan Tampilan Produk	4,00	4,67	3,67
Kepraktisan Penggunaan	4,00	4,67	3,67
Kebermanfaatan dan Inovasi	5,00	5,00	4,00
Nilai Rata-rata (Va) per Validator	4,60 (Sangat Layak)	4,80 (Sangat Layak)	3,87 (Layak)
Rata-rata Akhir (Va Akhir = 13,27 / 3)	4,42		

Kriteria Kevalidan	Layak ($3,50 < V_a \leq 4,50$)
---------------------------	---

Berdasarkan hasil pengolahan data validasi ahli, diperoleh total nilai kevalidan (V_a) sebesar 13,27 yang merupakan akumulasi dari penilaian tiga orang validator. Selanjutnya, total nilai tersebut dirata-ratakan dengan membaginya ke dalam jumlah validator, sehingga diperoleh nilai rata-rata akhir kevalidan (V_a akhir) sebesar 4,42 dengan kriteria yang dikategorikan layak sehingga dapat digunakan sebagai alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas di BPBD Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian, alur layanan (Draf 2) menjadi draf final alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi disabilitas di BPBD Barito Kuala.

Alur layanan final tersebut diberikan kepada BPBD untuk mengetahui respon selaku pengguna alur layanan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan terkait kelayakan, keterterapan, serta kebermanfaatan alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas di BPBD Kabupaten Barito Kuala. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesesuaian alur layanan yang disusun dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk potensi hambatan dan peluang penerapannya. Temuan dari wawancara kemudian dirangkum ke dalam beberapa aspek utama yang merepresentasikan penilaian informan terhadap kejelasan alur, prinsip inklusivitas, efektivitas koordinasi, serta keberlanjutan penerapan alur layanan. Ringkasan hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk tabel aspek dan temuan untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

No	Aspek	Respon
1	Kejelasan dan kesesuaian alur layanan	Alur layanan dinilai jelas, sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan mekanisme kerja BPBD Barito Kuala.
2	Keterterapan dan hambatan pelaksanaan	Alur layanan dapat diterapkan dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia, dengan hambatan utama pada keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus disabilitas.
3	Prinsip inklusif bagi penyandang disabilitas	Alur layanan telah mencerminkan prinsip inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas pada setiap tahapan penanggulangan bencana.
4	Manfaat terhadap kesiapsiagaan dan koordinasi	Alur layanan meningkatkan kesiapsiagaan, memperjelas pembagian peran, dan memperkuat koordinasi antarpetugas.
5	Evaluasi dan keberlanjutan alur layanan	Alur layanan dinilai layak digunakan saat ini dan direkomendasikan untuk dievaluasi secara berkala guna menjamin keberlanjutan penerapan.

Pembahasan

Pengembangan alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif menunjukkan bahwa integrasi kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem layanan kebencanaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang

menekankan bahwa layanan kebencanaan yang responsif terhadap kelompok rentan dapat mengurangi risiko keselamatan dan meningkatkan kualitas perlindungan. Keberadaan alur layanan yang jelas dan terstruktur juga memperkuat peran BPBD dalam melakukan koordinasi lintas sektor, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

1. *Define*

Tahap *define* bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dasar sebagai landasan pengembangan produk melalui pengumpulan data awal, seperti wawancara Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974 dalam (Slamet, 2022). Hasil wawancara dengan BPBD dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa layanan penanggulangan bencana banjir masih bersifat umum dan belum didukung oleh alur layanan atau SOP kebencanaan yang inklusif. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan mobilitas, keterbatasan akses informasi peringatan dini, serta kesulitan dalam proses evakuasi dan pengungsian.

Temuan tersebut sejalan dengan teori siklus manajemen bencana yang menekankan pentingnya layanan yang sistematis pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana (Bhattacharya et al., 2024), serta konsep disabilitas yang menyatakan bahwa hambatan muncul akibat lingkungan dan sistem layanan yang belum aksesibel (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas (Kemendikbud 2022)

2. *Design*

Tahap *design* merupakan proses penyusunan rancangan awal alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahap sebelumnya. Penyusunan draf sementara dilakukan untuk menggambarkan alur layanan pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana secara sistematis. Perancangan ini mengacu pada konsep alur layanan penanggulangan bencana yang menekankan kejelasan tahapan, keterpaduan kegiatan, serta pembagian peran antarinstansi agar layanan dapat berjalan efektif dan terkoordinasi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sebagaimana peran BPBD dalam penanggulangan bencana yang menuntut kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan (BPBD, 2022)

3. *Develop*

Tahap *develop* merupakan tahap penyempurnaan alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas agar siap diterapkan secara operasional. Penyusunan draf final dilakukan dengan memperhatikan pentingnya aksesibilitas layanan kebencanaan, mengingat keterbatasan akses informasi, fasilitas, dan dukungan yang masih menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan penyandang disabilitas dalam situasi bencana (Warih, 2022) Oleh karena itu, alur layanan dikembangkan secara lebih rinci dan aplikatif untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terakomodasi pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Selanjutnya, validasi ahli dan uji respon BPBD dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa alur layanan memiliki kejelasan, keterpahaman, dan kepraktisan dalam implementasi. Proses ini sejalan dengan pandangan (Guttermann, 2023) yang menekankan bahwa pengembangan layanan publik yang

efektif memerlukan evaluasi berbasis pengguna dan pemangku kepentingan agar produk yang dihasilkan benar-benar relevan dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan aspek koordinasi, pendampingan, dan kompetensi relawan dalam alur layanan mencerminkan pendekatan kebencanaan inklusif yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas perlindungan, sebagaimana dikemukakan oleh (Chibhoyi et al., 2024). Dengan demikian, alur layanan yang dikembangkan dinilai layak digunakan sebagai pedoman operasional penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas dengan tetap membuka ruang evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang pendidikan khusus dan manajemen kebencanaan, khususnya terkait konsep dan model alur layanan penanggulangan bencana banjir yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai kebencanaan inklusif, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan layanan penanggulangan bencana berbasis kebutuhan penyandang disabilitas, terutama pada konteks daerah rawan banjir.

Kebutuhan pengembangan alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas di BPBD Barito Kuala merupakan hal yang urgent atau penting karena BPBD Barito Kuala belum memiliki alur layanan sehingga penanganan penyandang disabilitas masih bersifat umum. Penyandang disabilitas mengalami hambatan mobilitas, keterbatasan informasi, serta kesulitan evakuasi, belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pengembangan alur layanan penanggulangan bencana banjir sangat diperlukan. Pengembangan Alur layanan penanggulangan bencana banjir bagi penyandang disabilitas di BPBD Barito Kuala, terdiri dari tahap design yang merupakan penyusunan draf sementara alur layanan sebagai gambaran awal. Melalui FGD, diperoleh masukan penting terkait penyempurnaan alur layanan. Tahap *develop* menghasilkan draf final yang disusun berdasarkan hasil FGD dan masukan peserta, sehingga lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hasil validasi ahli menunjukkan nilai kevalidan rata-rata 4,42 dengan kategori layak pada rentang $3,50 < V_a \leq 4,50$, serta uji respon BPBD menegaskan bahwa alur layanan dinilai layak digunakan dengan rekomendasi evaluasi berkala. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan layanan kebencanaan inklusif dengan pendekatan atau konteks wilayah yang berbeda.

Referensi

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Kolaborasi inklusif dalam upaya pengurangan risiko bencana. BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. (2024, 3 Mei). Lima tantangan penanggulangan bencana kini. BPBD Kabupaten Bogor. <https://bpbd.bogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/lima-tantangan-penanggulangan-bencana-kini>. (n.d.). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. (2024, 3 Mei). Lima tantangan penanggulangan bencana kini. BPBD Kabupaten Bogor. <https://bpbd.bogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/lima-tantangan-penanggulangan-bencana-kini>.
- Bencana, B. N. P. (2024). Data Bencana Indonesia 2024. BNPB. <https://www.bnpb.go.id>
- Bhattacharya-Mis, N., Jones, D., & Williams, F. (2024). The evolution of the disaster risk management cycle and its continuing applicability to an evolving flood threat. Springer.
- Chibhoyi, D., Mudzonga, E., & Gombero, P. (2024). Public service delivery in the context of disaster risk reduction. Open Access Library Journal, 11(1), 1–12.

- Geddarn, S. M., & Raj Kiran, C. A. (2024). Enhancing disaster management effectiveness: An integrated analysis of key factors and practical strategies through Structural Equation Modeling (SEM) and Scopus data text mining. *Geohazard Mechanics*, 2, 95–107. <https://doi.org/10.1016/j.ghm.2024.03.001>
- Guterman, A. S. (2023). Definitions and models of disability. ResearchGate. (2023).
- Hardani, H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Pustaka Ilmu.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Iqbal, U., Perez, P., & Barthelemy, J. (2021). A process-driven and need-oriented framework for review of technological contributions to disaster management. *Heliyon*, 7(11), e08405. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08405>
- Istiada, A., & Nisa, A. A. (2025). Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana: Systematic review. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(1), 193–204. <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jkj>
- Jeniawaty, S., & Rijanto, A. (2023). *Manajemen bencana: Konsep dan implementasi*. Universitas Terbuka Press.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Direktorat Pendidikan Khusus, Kemendikbud.
- Kuala, P. K. B. (2022). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah*. Pemkab Batola.
- Mirawati. (2020). Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas melalui partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 110–123.
- Nakoe, M. R., Lalu, N. A. S., Manajemen, Bencana, Sablon, U. D. D., Manajemen, Bencana, Nakoe, M. R., & Lalu, N. A. S. (2022). *Penulis : Deepublish*.
- Nisa, F. (2021). Implementasi kebijakan inklusi sosial dalam kebencanaan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 221–233.
- UNDRR, U. N. O. for D. R. R. (2020). *Disaster Risk Reduction and Sustainable Development: Building Resilience for a Safer Future*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. <https://www.undrr.org/publication/disaster-risk-reduction-and-sustainable-development>
- Pelling, M. (2023). Adaptive service pathways: Linking policy, operations, and outcomes in disaster governance. *Environmental Science & Policy*, 146, 102–117.
- Picasauw, D. B. (2020). *Upaya BPBD Balikpapan dalam penanggulangan bencana banjir*. Universitas Mulawarman.
- Pramono, C., Nurhidayati, I., & Niswah, H. (2023). *Kebutuhan Kesiapsiagaan Pada Disabilitas Dalam Menghadapi Bencana Alam*. JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa.
- Raya, A. P. (2022). *Strategi BPBD Barito Kuala dalam pengurangan risiko bencana banjir*. Universitas Lambung Mangkurat.

- Rohman Syah, R., & Rahmat, H. K. (2025). Pendidikan kebencanaan dalam pembangunan sadar bencana untuk penyandang disabilitas. *Jagratara: Journal of Disaster Research*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.35719/ijdr.v3i1.191>
- Slamet, F. A. (2022). Model penelitian pengembangan (R n D). Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
- Syugiarto, S., Khaldun, R. I., Tawil, Y. P., & Kusnadi, H. W. (2022). Pemulihan pasca-bencana di Indonesia: Perlukah dilakukan perubahan kebijakan? *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 152–161. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Warih, M. (2022). Pelayanan publik inklusif di lembaga pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 25–38.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 15–29.